

**ANALISIS PERKEMBANGAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH
(STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMUJU
TAHUN ANGGARAN 2013-2023)**



**DIAJUKAN OLEH
NAMA: DESSY FITRAHTUL HANIF
NIM: 126231101**

**PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024**

LAPORAN TUGAS AKHIR
ANALISIS PERKEMBANGAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH
(STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMUJU
TAHUN ANGGARAN 2013-2023)



DIAJUKAN OLEH
NAMA: DESSY FITRAHTUL HANIF
NIM: 126231101

UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT UNTUK KELULUSAN PADA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024

**ANALISIS PERKEMBANGAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH
(STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMUJU
TAHUN ANGGARAN 2013-2023)**

Laporan Tugas Akhir

Diajukan Oleh:

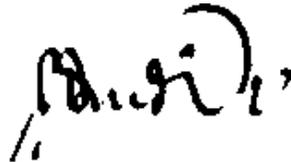


DESSY FITRAHTUL HANIF

126231101

Disetujui Oleh:

Pembimbing



SARWO EDY HANDOYO, Dr., S.E., M.M.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kemandirian keuangan pada Pemerintah Kabupaten Mamuju dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2013 – 2023. Metode Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan menganalisa perkembangan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mamuju dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2023 serta kontribusi perolehan PAD terhadap Pendapatan Daerah, selanjutnya analisa perkembangan perolehan Pendapatan Transfer Kabupaten Mamuju serta proporsi perolehannya terhadap Pendapatan Daerah dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2023 guna mengetahui tingkat ketergantungan terhadap dana dari pemerintahan lain (pusat maupun provinsi), kemudian melakukan penghitungan nilai Indeks Kemandirian Fiskal dan mengklasifikasikan hasil perhitungan. Kemandirian keuangan pemerintah kabupaten Mamuju dalam 10 tahun terakhir yaitu 2013-2023 termasuk dalam klasifikasi “Belum Mandiri” dengan rata-rata nilai sebesar 0,0705. Analisa atas tren IKF, terdapat fluktuasi nilai IKF pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju, namun dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, tren menunjukkan peningkatan atau positif. Faktor-faktor yang menjadi penghambat kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju adalah kurangnya perolehan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta tingginya tingkat ketergantungan pendapatan transfer.

Kata kunci: Keuangan Daerah; Kemandirian Keuangan; PAD; Pendapatan Transfer

ABSTRACT

This research aims to assess the financial independence of the Mamuju Regency Government and determine the factors that influence it. This research uses Mamuju Regency Regional Government Financial Report data for 2013 - 2023. The research method uses a qualitative case study approach by analyzing the development of Regional Original Income (PAD) Mamuju Regency acquisition from 2013 to 2023 as well as the contribution of PAD acquisition to Regional Income, then analyzing the development of Regency Transfer Income acquisition Mamuju and the proportion of its revenues to Regional Revenue from 2013 to 2023 in order to determine the level of dependence on funds from other governments (central and provincial), then calculate the Fiscal Independence Index value and classify the calculation results. The financial independence of the Mamuju district government in the last 10 years, namely 2013-2023, is included in the "Not Yet Independent" classification with an average value of 0.0705. Analysis of the IKF trend, there are fluctuations in the IKF value in the Mamuju Regency Regional Government, but in the last three years, the trend shows an increase or is positive. Factors that hinder regional financial independence in the Regional Government of Mamuju Regency are the lack of acquisition of Regional Original Income (PAD) and the high level of dependence on central transfer income.

Keywords: Regional Finance; Financial autonomy; PAD; Transfer Income

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil Alamin, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan pertolonganNya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis tugas akhir ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan para pengikut beliau sampai akhir zaman nanti.

Dalam proses penulisan tugas akhir ini, penulis mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Jamaludin Iskak, SE., M.Si., Ak., CA., CPA., ASEAN CPA, Kepala Program Studi PPA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Sarwo Edy Handoyo, Dr., S.E., M.M. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan karya akhir dengan sebaik mungkin.
3. Amrul Hakim dan R. Raheesh Hakim yang senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
4. Seluruh dosen dan staf pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu, pandangan, perhatian dan dukungan kepada penulis.
5. Keluarga dan rekan kerja penulis, Nur Fajar I.S. dan Adam Ramadhan yang senantiasa mendukung penulis.

Akhir kata penulis memohon maaf apabila masih banyak terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini.

Mamuju, 30 Juni 2024



Dessy Fitrahtul Hanif

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	3
BAB II LANDASAN TEORI.....	4
2.1. Otonomi Daerah	4
2.2. Pendapatan Asli Daerah	5
2.3. Tingkat Ketergantungan terhadap pendapatan transfer.....	6
2.4. Kemandirian Fiskal	6
BAB III METODE PENELITIAN.....	10
3.1 Jenis Penelitian	10
3.2 Populasi dan Teknik Penentuan Sampel	10
3.3 Metode Pengumpulan Data	10
3.4 Metode Analisis Data	10
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	12
4.1. Hasil Pengumpulan dan Perhitungan Data.....	12
4.2. Pembahasan.....	14
4.2.1.PAD dan Proporsi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju.....	14
4.2.2.Pendapatan Transfer dan Ketergantungan Fiskal Daerah.....	15
4.2.3.Indeks Kemandirian Fiskal Kabupaten Mamuju	16
4.2.4.Keterkaitan PAD, Pendapatan Transfer, dan Kemandirian keuangan Daerah	18
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	19
5.1 Simpulan.....	19
5.2 Saran.....	20
Referensi	21

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Klasifikasi Kondisi Kemandirian Fiskal Daerah.....	9
Tabel 4.1	Hasil Pengumpulan Data serta Perhitungan Nilai IKF Kabupaten Mamuju TA 2013-2023.....	13
Tabel 4.2	Realisasi PAD Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2013 – 2023...	14
Tabel 4.3	Proporsi Pendapatan Transfer Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2013 – 2023.....	15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Grafik Nilai IKF.....	17
----------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan peraturan perundang-undangan mengatur ketentuan bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah. Melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah memberikan kewenangan otonomi daerah yang bertujuan agar pelaksanaan pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat yang merupakan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintah daerah dapat meningkat serta sebagai upaya meningkatkan stabilitas politik dan persatuan bangsa. Handoko (2021) keberlangsungan merupakan hal yang penting terutama dalam hal keberlanjutan. Sesuai dengan azas desentralisasi, daerah otonom mempunyai kewenangan dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat termasuk didalamnya urusan pengelolaan keuangan. Halim (2001) menjelaskan bahwa suatu daerah dikatakan mampu mencapai otonomi yaitu jika memiliki kapasitas perekonomian daerah, yang berarti bahwa daerah tersebut harus mempunyai otoritas atau kewenangan dan kapabilitas untuk mengumpulkan sumber daya ekonomi yang dimiliki, mengelola dan menggunakan perkonomiannya untuk pendanaan kegiatan pemerintahannya, dan ketergantungan terhadap bantuan pusat diminimalkan agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi bagian terbesar sumber perkonomian sehingga dapat meningkatkan peran pemerintah daerah.

Pemindahan ibu kota negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara memberikan dampak signifikan pada daerah sekitarnya dengan meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Sebagai kabupaten yang berada disekitar ibu kota baru, Kabupaten Mamuju yang terletak di Provinsi Sulawesi Barat, menjadi salah satu kabupaten yang menjadi peyangga IKN. Potensi pertumbuhan ekonomi yang signifikan dengan adanya investasi baru dan peningkatan aktivitas bisnis sebagai dampak dari pemindahan ibu kota negara mendorong kabupaten Mamuju dalam meningkatkan kemandiriannya dalam hal keuangan. Kabupaten Mamuju, sebagai subjek studi, tentunya menghadapi tantangan dalam mencapai kemandirian keuangannya

terutama terkait tingkat ketergantungan dana yang diterima dari pemerintah pusat dan pengelolaan pendapatan asli daerahnya. Kondisi perekonomian pada Kabupaten Mamuju yang selama sepuluh tahun terakhir mengalami perubahan yang signifikan akibat adanya resesi, pandemi Covid-19, bencana gempa bumi, serta pemindahan ibu kota negara.

Sulawesi Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia dan merupakan provinsi paling barat di Pulau Sulawesi. Terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat merupakan hasil pemekaran Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Oktober 2004, untuk kemudian Kabupaten Mamuju ditetapkan sebagai ibu kota provinsi tersebut. Pada tahun 2020, BPK RI melaksanakan penilaian terhadap kemandirian keuangan pada seluruh pemerintah daerah di Indonesia dan ditemukan bahwa sebagian besar pemerintah daerah masih belum mandiri. Hasil audit memperlihatkan bahwa pada tahun anggaran 2019, terdapat 458 dari 497 kabupaten/kota yang masuk dalam kategori belum mandiri, di mana salah satunya adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju. Berdasarkan hal tersebut penulis akan melakukan analisis lebih dalam untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju terkait dengan perkembangan kemandirian keuangan selama sepuluh tahun terakhir. Untuk melihat kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Mamuju, akan dilakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kemandirian keuangan daerah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dengan melihat indikator tingkat ketergantungan pada pendapatan transfer serta pendapatan asli daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Kemandirian keuangan daerah dibutuhkan oleh pemerintahan yang bersifat desentralisasi dalam membiayai setiap kebijakan dan Pembangunan di daerah. Perkembangan kemandirian keuangan dari tahun ketahun akan menunjukkan bagaimana suatu daerah mampu berkembang secara mandiri. Berdasarkan hal ini, pertanyaan penilitan yang nantinya akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan perolehan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju guna membiayai kegiatan pemerintahannya?
2. Bagaimana perkembangan pendapatan transfer pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju guna membiaya kegiatan pemerintahannya?

3. Bagaimana perkembangan indeks kemandirian fiskal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju dalam kurun waktu 10 tahun terakhir?
4. Bagaimana pengaruh perolehan PAD dan Pendapatan Transfer terhadap kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor yang memengaruhi kemandirian keuangan pemerintah daerah kabupaten Mamuju serta untuk memahami sejauh mana pemerintah daerah Kabupaten Mamuju bergantung pada dana yang diterima dari pemerintah pusat dan mengevaluasi kontribusi Pendapat Asli Daerah (PAD) terhadap keuangan daerah secara keseluruhan. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisa perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju
2. Mengetahui dan menganalisa perkembangan pendapatan transfer pusat guna membiaya kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju
3. Mengetahui dan menganalisa perkembangan indeks kemandirian fiskal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju dalam kurun waktu 10 tahun terakhir
4. Mengetahui dan menganalisa pengaruh perolehan PAD dan Pendapatan Transfer Dana Pusat terhadap kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah Kabupaten Mamuju sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah.

Referensi

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Laporan Hasil Reviu Atas Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2018 dan 2019*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2011, Oktober 12). Pemerintah Daerah. *Kabupaten Mamuju*. Diakses dari <https://sulbar.bpk.go.id/kabupaten-mamuju-2/>
- BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. (2014). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2013*. Mamuju: BPK RI.
- BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. (2015). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2014*. Mamuju: BPK RI.
- BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. (2016). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2015*. Mamuju: BPK RI.
- BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. (2017). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2016*. Mamuju: BPK RI.
- BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. (2018). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2017*. Mamuju: BPK RI.
- BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. (2019). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2018*. Mamuju: BPK RI.
- BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. (2020). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2019*. Mamuju: BPK RI.
- BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. (2021). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2020*. Mamuju: BPK RI.
- BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. (2022). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021*. Mamuju: BPK RI.

- BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. (2023). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2022*. Mamuju: BPK RI.
- BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat (2024). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023*. Mamuju: BPK RI.
- BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. (2022). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Mamuju Tahun 2021*. Mamuju: BPK RI.
- Halim, A. (2001). *Bunga rampai: Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Pertama*. Yogyakarta: UPP UMP YKPN
- Halim, A. (2004). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handoko, Aldo Leo & Handoyo, Sarwo Edy. (2021). Pengaruh Kinerja Keuangan, Biaya Keagenan, dan Tata Kelola Terhadap Kemungkinan Financial Distress. Universitas Tarumanaga: Jurnal Manajerial dan Kewirahusahaan, 3(2), 287-297.
- Herdiansyah, Haris. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hunter, J. S. (1977). *Federalism and fiscal balance: a comparative study*. Canberra: Australian Nasional University Press for Research on Federal Fiscal.
- Indonesia. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Di Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Sekretariat Negara: Jakarta.
- Indonesia. (2022). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Kuningan, B. K. (2023, Februari 23). Artikel. *Mengenal APBD Lebih Dekat Pendapatan Asli Daerah*. Diakses dari <https://bpkad.kuningankab.go.id/detail/mengenal-apbd-lebih-dekat-pendapatan-daerah>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

Taufick, A. (2016). *Analisis Pengaruh Tingkat Kemandirian Fiskal dan Belanja Modal Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013*. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya.